

# PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SKPK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Nazaruddin<sup>1</sup>, Darwanis<sup>2</sup>, Syukriy Abdullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3</sup>) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

*Abstract* The aim of this study was to determine the influence of education, training and understanding of accounting to the timeliness of financial reporting area, either jointly or individually. The population in this study are all officials of Financial Administration (SKPK) as many as 58 people, while the source of the data in this study are primary data from survey questionnaires in the form of a structured statements. The results showed that jointly variable level of education, training and understanding of accounting positive influence on the timeliness of financial reports on SKPK in East Aceh District, while partially shows that the level of education, training and understanding of accounting positive influence on the timeliness of reporting financial SKPK in East Aceh District.

**Keywords** Level of Education, Training, Understanding Accounting, and Timeliness submission of Financial Statements

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPK) sebanyak 58 orang, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari *survey kuesioner* dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

**Kata kunci :** Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Pemahaman Akuntansi, dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.

## PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan seperti saat ini, seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good Governance*) telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik (Mardiasmo, 2006:5)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) adalah: Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki 4 unsur yakni: a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu; b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian

masa kini; c) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah; dan d) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintah daerah tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menarik untuk dikaji karena banyak penyimpangan ditemukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara baru menerima tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 33 kabupaten/kota. Tahun 2013 hanya 15 (lima belas) kabupaten/kota yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2012 tepat waktu. Sebagian Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran 2013 tidak sesuai dengan jadwal. Hal senada terjadi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyampaikan laporan keuangan *anaudited* tahun 2013 kepada BPK-RI terlambat 7 (tujuh) hari dari ketetapan waktu yang telah ditetapkan. (BPK-RI, 2013:77-96).

Fenomena lainnya diperoleh dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak 5 (lima) tahun berturut-turut mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu penyebabnya adalah belum tepatnya waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terjadi karena SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terlambat menyampaikan laporannya ke PPKD sehingga pengonsolidasian ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi terlambat. Oleh karena itu, BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah segera melakukan upaya-upaya intensif dalam meningkatkan sumber daya manusia dan fungsi dari pegawai pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menangani penyusunan laporan keuangan daerah (BPK-RI, 2014:65).

Kenyataan yang terjadi saat ini banyak SKPD terlambat menyampaikan pertanggungjawabannya kepada PPKD dengan

alasan pengguna anggaran belum tanda tangan bahkan banyak SKPD menimpakan semua tugas penatausahaan keuangan kepada bendahara mulai dari melakukan pembayaran, menyusun laporan pertanggungjawaban, melakukan verifikasi, analisis atas laporan pertanggungjawaban pada SKPD yang sebetulnya tugas PPK selaku pelaksana fungsi akuntansi. Hal ini terjadi karena PPK-SKPD tidak memahami tugasnya dan juga pengguna anggaran tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan SKPD.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Pendidikan**

Pendidikan bagi suatu bangsa berfungsi sebagai cara atau sarana dalam memajukan peradaban kebudayaan bangsa. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan jenjangnya.

Fattah (2004:5) mendefinisikan beberapa ciri pendidikan, antara lain; (a) pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup; (b) untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha terencana dalam memilih isi (materi) strategi dan teknik penilaian yang sesuai; dan (c) kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat (formal dan non formal).

Dalam sistem pendidikan, jenjang

pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Tingkat pendidikan pejabat keuangan daerah adalah tingkatan pendidikan yang diperoleh secara formal oleh pejabat keuangan daerah yang dibuktikan dengan ijazah formal, ijazah adalah tanda pengakuan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. Ijazah tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan seseorang.

Batasan tingkat pendidikan pejabat keuangan daerah dapat diartikan jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh pejabat keuangan daerah. Dalam hal ini, jenjang pendidikan tinggi yang dimaksud adalah mencakup program atau tingkat diploma, sarjana, magister dan doktor. Tingkat diploma terbagi menjadi Diploma Satu (D1), D2, D3, dan D4. Tingkat sarjana, magister, dan doktor yang masing-masing sama artinya dengan Sarjana Strata Satu (S1), S2, dan S3.

Tingkat pendidikan menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan yang baik. Setiap SKPD harus mempunyai aparatur yang kompeten serta

dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan akuntansi dan keuangan yang memadai.

### **Pelatihan**

Pelatihan dilakukan untuk memberikan atau meningkatkan kemampuan diri dalam mencapai tujuan organisasi. Simanjuntak (2010:3) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (*human investment*) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, dan membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Menurut Dessler (2009:71) pelatihan merupakan proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Dessler (2009:83) mengemukakan beberapa alasan mengapa pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian manajemen sumber daya manusia, diantaranya; pegawai belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, adanya

perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja, meningkatnya daya saing dan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ivancevich dkk. (2008:98) pelatihan adalah sebagai “usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera”. Lebih lanjut, Ivancevich (2008:101) menyebutkan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini. Pelatihan (*training*) adalah “sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

### **Pemahaman Akuntansi**

Paham dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi.

Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses atau praktik. Menyadari tidak

semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi dan laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menggunakan informasi keuangan maka diperlukan teknik untuk menganalisis laporan keuangan (Mahmudi 2010:124).

Untuk lebih memahami akuntansi sektor publik secara komprehensi perlu diketahui sistem dan prosedur akuntansi, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta memahami komponen-komponen laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

### **Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor) dan peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) (Mardiasmo 2006:15).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo : 6).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD penyampaian tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari suatu riset yang mencakup garis besar dari apa yang akan dilakukan seseorang investigator mulai dari penulisan hipotesis serta implikasi operasionalnya hingga ke analisis akhir data (Cooper dan Emory, 2003:156).

Tujuan dari desain penelitian dilakukan agar data dapat dikumpulkan dan dianalisis sampai mendapat sebuah kesimpulan. Menurut Sekaran (2006:152) desain penelitian meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan rasional yang berkaitan dengan tujuan penelitian, letaknya, jenis yang sesuai

untuk penelitian, tingkat manipulasi dan kontrol peneliti, aspek temporal, dan level analisis data.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Cooper (2006:112) menyatakan bahwa populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen untuk menentukan beberapa kesimpulan. Sedangkan menurut Kuncoro (2009:118) “populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian”.

Dalam hal populasi yang akan diteliti termasuk kecil dan saling berbeda satu sama lain, maka pengambilan sampel tidak dilakukan karena tidak dapat mewakili populasi dan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan sampel tidak tepat sebagai perkiraan dari nilai-nilai populasi (Cooper, 2006:114) dan berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan populasi terbatas yaitu populasi yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif (Bungin, 2008:109).

Penelitian ini merupakan penelitian sensus terdiri dari 58 (lima puluh delapan) SKPK dijadikan unit penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruh Kepala Bagian Akuntansi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

### **Peralatan Analisis Data**

Untuk menganalisis data digunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif, semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program SPSS (*Statistical Package for Sosial Science*). Untuk menganalisis data dilakukan pengujian data dan pengujian hipotesis.

Dalam menganalisis data perlu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sesuai dengan yang diukur dan juga melihat konsistensi data yang dikumpulkan. Suatu penelitian yang dapat dipercaya sangat ditentukan oleh alat pengukuran yang digunakan untuk variabel yang diteliti.

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pemahaman Akuntansi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,784 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 78,44. Artinya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tingkat pendidikan ( $X_1$ ), pelatihan ( $X_2$ ) dan pemahaman akuntansi ( $X_3$ ) sehingga mempunyai hubungan

yang kuat terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPK Kabupaten Aceh Timur.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 0,615. Artinya sebesar 61,5% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam faktor tingkat pendidikan ( $X_1$ ), pelatihan ( $X_2$ ) dan pemahaman akuntansi ( $X_3$ ). Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 38,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari dua variabel yang dijadikan indikator penelitian artinya masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK Aceh Timur.

Koefisien regresi pendidikan sebesar 0,135. Syarat untuk menyatakan bahwa pendidikan ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ( $Y$ ) jika  $\beta_{X_1} \neq 0$ . Mengacu pada syarat tersebut hasil penelitian ini menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

Penelitian ini sesuai dan sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2009), dimana tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazier (2012) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

responden mampu berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Koefisien regresi pelatihan pejabat penatausahaan keuangan sebesar 0,170. Syarat untuk menyatakan bahwa pelatihan pejabat penatausahaan keuangan (X2) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y) jika  $\beta_{x_2} \neq 0$ . Mengacu pada syarat tersebut hasil penelitian ini menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

Hasil penelitian terhadap variabel pelatihan pejabat penatausahaan keuangan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almanidar (2010), dimana pelatihan mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara pendidikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Koefisien regresi pemahaman akuntansi sebesar 0,175. Syarat untuk menyatakan bahwa pemahaman akuntansi (X3) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Y) jika  $\beta_{x_3} \neq 0$ . Mengacu pada syarat tersebut hasil penelitian ini menolak  $H_0$  atau menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

Hasil pengujian secara simultan

menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X1), pelatihan (X2), pemahaman akuntansi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur. Hasil penelitian secara simultan juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Winindyaningrum dan Rahmawati (2010), bahwa tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Pemda Subosukowonostraten.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
2. Variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
3. Variabel pelatihan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
4. Variabel pemahaman akuntansi pejabat penatausahaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan



keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

#### **Keterbatasan**

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
2. Variabel tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
3. Variabel pelatihan secara parsial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.
4. Variabel pemahaman akuntansi pejabat penatausahaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada SKPK di Kabupaten Aceh Timur.

#### **Saran-saran**

1. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini dengan penelitian terdahulu dan penelitian berikutnya.
2. Mengenai variabel dan responden, agar penelitian berikutnya lebih representatif dalam menentukan dan memilih objek penelitian maupun menambah:

- a. Memperbanyak responden dari beberapa pemerintah daerah
- b. Memperbaiki rancangan kuesioner sehingga bisa lebih mudah dijawab oleh responden atau bisa mengungkap lebih banyak fenomena.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi sektor publik. Jakarta: Erlangga
- BPK RI. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2013*. Banda Aceh: BPK-RI Perwakilan Aceh
- ..... 2013. *Warta BPK*. Tabloid edisi 4 Volume III April 2013. Jakarta.
- ..... 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cooper, Donald R dan William C. Emory. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Index.
- Eriva, Cut Yunina. 2013. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja, dan Jabatan terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 1 No. 2 Februari. hal. 1-14
- Fatah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hariandja, Tuan Efendi Marihot. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Ivancevich, John M, Robert Konopaske, Michael T. Matteson. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2. Alih Bahasa oleh Gina Cania. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1, hal. 1-17.
- Mathis, R.L dan J.H. Jackson, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nasution, Anwar. 2009. *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Aceh Buruk*. Aceh Press, 9 Januari 2009.
- Nitisemito, Alex S. 1996. *Manajemen Personalia: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gholia Indah.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 2012 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Verja Lembaga Teknis Daerah.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. 4rd Edition. Jakarta: Selemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirman, D. 2009. Terbatasnya Kompetensi SDM Salah Satu Penyebab Buruknya Pengelolaan Keuangan Daerah. *Warta Pengawasan*. Vol.XVI hal 19-26.
- Tulus, Moh. Agus. 1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Word Bank. 2007. *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh*. Jakarta: The Word Bank.